



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Juli 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WALUYO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEARSIPAN (PPS)
3. NHK : 963043

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **355.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/65 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 2.973 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **70.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF 83/MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 D Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N19M1 A/T/SPM SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA NF11B2D1 M/T/SPM SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 A/T /SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **23.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **7.494.026**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **455.494.026**



III. HUTANG

Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 430.494.026

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.